



JPAK

Vol. 5, Tahun ke-3, April 2011

ISSN; 2085-0743

GLOBALISASI EKONOMI DAN PEMISKINAN MASYARAKAT:
BAGAIMANA INSTITUSI AGAMA MERESPONNYA.

Ola Rongan Wilhelmus

KELUARGA KRISTIANI DAN RELASI
PERSAUDARAAN DALAM DINAMIKA TEKNOLOGI KOMUNIKASI.

JS. Wibowo Singgih

KELUARGA MENJADI SEMINARI DASAR
BAGI PANGGILAN IMAM DAN HIDUP MEMBIARA.

Agustinus Supriyadi

KELUARGA DAN EKARISTI.

Don Bosco Karnan Ardijanto

TUHAN, AJARLAH KAMI BERDOA:
MERENUNGAN KASIH TUHAN DI TENGAH KEDUKAAN
DAN KECEMASAN KELUARGA.

Yuventius Fusingantoro

PERTAHANAN IMAN KELUARGA KATOLIK
YANG KECIL, LEMAH, MISKIN DAN
TERSINGKIR DALAM ARUS GLOBALISASI JAMAN INI.

Suparto

NARKOBA DAN AKAR TANGGUNG JAWAB KELUARGA.

Hipolitus K. Kewuel

KELUARGA DAN PENDIDIKAN IMAN ANAK DI ERA GLOBALISASI.

Antonius Tse

KELUARGA BERENCANA DAN PRAKTEK KB DALAM KELUARGA
KATOLIK.

Antonius Virdei Eresto Gaudiawan

"ASRAMA DAN PONDOK PESANTREN
SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURAL"

R. Anton Trinendyantoro

Jurnal Pendidikan Agama Katolik

Lembaga Penelitian
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Teologi Katolik
"Widya Yuwana"
MADIUN

JPAK

JURNAL PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) adalah media komunikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mewadahi hasil penelitian, hasil studi, atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Katolik sebagai salah satu bentuk sumbangan STKIP Widya Yuwana Madiun bagi pengembangan Pendidikan Agama Katolik pada umumnya.

Penasihat

Ketua Yayasan Widya Yuwana Madiun

Pelindung

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Penyelenggara

Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun

Ketua Penyunting

Hipolitus Kristoforus Kewuel

Penyunting Pelaksana

FX. Hardi Aswinarno

DB. Karnan Ardijanto

Penyunting Ahli

John Tondowidjojo

Ola Rongan Wilhelmus

Armada Riyanto

Sekretaris

Gabriel Sunyoto

Alamat Redaksi

STKIP Widya Yuwana

Jln. Mayjend Panjaitan. Tromolpos: 13. Telp. 0351-463208. Fax. 0351-483554

Madiun 63137 – Jawa Timur – Indonesia

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, STKIP Widya Yuwana Madiun. Terbit 2 kali setahun (April dan Oktober).



DAFTAR ISI

iii Editorial

1 GLOBALISASI EKONOMI DAN PEMISKINAN MASYARAKAT: BAGAIMANA INSTITUSI AGAMA MERESPONNYA

Ola Rongan Wilhelmus

21 KELUARGA KRISTIANI DAN RELASI PER-SAUDARAAN DALAM DINAMIKA TEKNOLOGI KOMUNIKASI

JS. Wibowo Singgih

41 KELUARGA MENJADI SEMINARI DASAR BAGI PANGGILAN IMAM DAN HIDUP MEMBIARA

Agustinus Supriyadi

54 KELUARGA DAN EKARISTI

Don Bosco Karnan Ardijanto

77 TUHAN, AJARLAH KAMI BERDOA: MERENUNGAN KASIH TUHAN DI TENGAH KEDUKAAN DAN KECEMASAN KELUARGA

Yuventius Fusi Nusantoro

87 PERTAHANAN IMAN KELUARGA KATOLIK YANG KECIL, LEMAH, MISKIN DAN TERSINGKIR DALAM ARUS GLOBALISASI JAMAN INI

Suparto

- 113** NARKOBA DAN AKAR TANGGUNG JAWAB
KELUARGA
Hipolitus K. Kewuel
- 125** KELUARGA DAN PENDIDIKAN IMAN ANAK DI ERA
GLOBALISASI
Antonius Tse
- 151** KELUARGA BERENCANA DAN PRAKTEK KB
DALAM KELUARGA KATOLIK
Antonius Virdei Eresto Gaudiawan
- 189** “ASRAMA DAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI
MODEL PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTI-
KULTURAL”
R. Anton Trinendyantoro

GLOBALISASI EKONOMI DAN PEMISKINAN MASYARAKAT: BAGAIMANA INSTITUSI AGAMA MERESPONNYA?

Ola Rongan Wilhelmus
STKIP Widya Yuwana Madiun

ABSTRACT

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas merupakan di satu pihak sumber kekayaan bagi pemilik modal besar dan mereka yang memiliki akses kekuasaan, di pihak lain globalisasi menjadi sumber pemiskinan dan mala petaka bagi kebanyakan keluarga dan masyarakat kecil. Sadar akan kenyataan ini, para intelektual negara-negara berkembang sepakat bahwa globalisasi ekonomi merupakan mesin kapitalis yang memproduksi kemiskinan global karena telah merampas sebagian besar dari kekayaan dunia untuk segelintir orang. Peningkatan mutu kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta upaya mencari solusi atas masalah kemiskinan akibat kebijakan ekonomi global dan pasar bebas ini merupakan bagian dari misi profetis dan tanggung jawab semua agama dan umat beriman. Agama Katolik sebagai suatu institusi sosial di tengah masyarakat dunia mempunyai tugas dan tanggungjawab profetik untuk membela dan membebaskan keluarga dan masyarakat yang kurang beruntung dari kemiskinan dan ketertindasan melalui bantuan karitatif maupun pemberdayaan sosial ekonomi, politik, kesehatan dan lain-lain.

KEY WORDS: *Globalisasi Ekonomi, Pasar Bebas, Kemiskinan, Misi Profetik Agama*

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas sejauh ini telah digembar-gembor sebagai kekuatan magis yang mampu meningkatkan taraf hidup sosial-ekonomi masyarakat global. Ekonomi global diyakini sebagai kekuatan besar yang mampu mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk maju secara lebih cepat dalam bidang industri dan produksi. Perdagangan global mendorong manusia menggunakan faktor-faktor produksi dunia secara lebih efisien dan dengan demikian meningkatkan pendapatan, tabungan, pembelanjaan dan kesejahteraan hidup masyarakat dan keluarga kecil. Berdasarkan keyakinan ini maka globalisasi yang biasanya dikaitkan dengan menerima gaya hidup dan tata nilai kapitalisme sejati sebagai syarat kemajuan, kesejahteraan dan pemungkas kemiskinan dipaksakan untuk diterima semua masyarakat dunia, terutama masyarakat dari negara-negara berkembang.

Bertentangan dengan persepsi tentang globalisasi ekonomi sebagai sebuah peluang magis untuk kemajuan dan kesejahteraan hidup masyarakat dan keluarga kecil, laporan dari *The International Forum on Globalization (2004)* menunjukkan bahwa seperlima orang terkaya dari penduduk dunia mengkonsumsi 86 % dari semua barang dan jasa. Sedangkan seperlima dari masyarakat miskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit. Seperlima dari mereka yang terkaya ini juga menikmati 82 % perdagangan dan 68 % investasi asing langsung. Sadar akan kesenjangan persepsi optimistik tentang kebijakan ekonomi global dan pasar bebas serta realitas kehidupan yang sesungguhnya maka kebanyakan intelektual negara-negara berkembang sepakat bahwa globalisasi ekonomi dan pasar bebas dalam kenyataan tidak membawa banyak keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya menjadi sumber pemiskinan dan kemelaratan bagi keluarga dan masyarakat kecil.

Kesenjangan persepsi tentang berkah dari globalisasi ekonomi dan pasar bebas serta realitas sosial ekonomi yang dialami masyarakat ini melatarbelakangi tulisan ini. Tulisan ini dibuat dengan tujuan: pertama, melalukan diskusi singkat tentang globalisasi ekonomi dan pasar bebas serta reaksi pro dan kontra; kedua, menganalisis pengaruh globalisasi ekonomi terhadap persoalan ekonomi pada level makro maupun mikro; ketiga, menganalisis hubungan antara globalisasi ekonomi dan pemiskinan; dan ke empat, mengadvokasi sikap institusi agama terhadap persoalan kemiskinan sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dan pasar bebas.

1. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas diartikan sebagai suatu proses menjadikan ideologi kapitalisme sebagai ideologi universal yang harus dianut semua bangsa secara sukarela ataupun terpaksa. Suatu proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Eropa dan Amerika Utara menjadi sistem ekonomi global atau sistem yang mendominasi dunia atas cara mengintegrasikan perekonomian nasional ke dalam tatanan perekonomian global. Proses globalisasi ekonomi ini disponsor oleh negara-negara industri dan lembaga-lembaga internasional kapitalis seperti WTO, Bank Dunia dan IMF (Widyamartaya & Widyanta, 2004).

Pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global dilakukan antara lain melalui proses privatisasi, pasar bebas, penghapusan berbagai hambatan terkait dengan perpindahan barang, modal dan jasa dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dan sebaliknya. Pengintegrasian ini mengakibatkan semua kegiatan ekonomi dan perdagangan dari berbagai bangsa dan negara terpadu menjadi suatu kekuatan ekonomi dan pasar global yang semakin terintegrasi dan bebas rintangan teritorial, budaya, ideologi dan sosial. Globalisasi ekonomi dan pasar bebas di satu pihak membuka peluang bagi pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara lebih kompetitif, tetapi dipihak lain membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik dan menguasainya (Haris & Dudy, 2002; Widyamartaya & Widyanta, 2004).

Globalisasi ekonomi juga terjadi dalam bentuk globalisasi produksi. Dalam globalisasi industri ini, suatu perusahaan internasional bisa berproduksi pada berbagai negara dan terus berjuang supaya biaya produksi menjadi lebih rendah dengan menurunkan upah buruh dan tarif bea masuk, membangun infrastruktur memadai, menciptakan iklim usaha dan politik yang lebih kondusif. Kehadiran tenaga kerja asing merupakan bagian dari globalisasi industri. Perusahaan-perusahaan global dapat memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia baik tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian khusus dan berpengalaman internasional, maupun tenaga kerja buruh kasar dan murah dari negara berkembang. Melalui globalisasi industri, perusahaan-perusahaan global mendapatkan akses untuk memperoleh pinjaman dan melakukan investasi pada berbagai negara di dunia (Haris & Dudy, 2002).

Bertentangan dengan pandangan optimistik tentang globalisasi ekonomi dan pasar bebas itu, masyarakat pada negara-negara berkembang pada umumnya berpendapat bahwa substansi dari ekonomi global dan pasar bebas tidak lain dari pada imperialisme baru. Globalisasi ekonomi merupakan sistim baru ekonomi dunia para kapitalis yaitu: TNCs (transnational corporations), Bank Dunia, IMF, IFIs (international financial institutions), G-8, TC (Trilateral Commission), dan WEF (the World Economic Forum). Bagi mereka, globalisasi ekonomi dan pasar bebas sejauh ini telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan multinasional dan bermodal besar memonopoli berbagai sektor bisnis bahkan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Amin Rais dalam bukunya: *Selamatkan Indonesia* (2008) mengemukakan bahwa globalisasi ekonomi dan pasar bebas merupakan neo-imperialisme. Jeffrey Sachs, seorang profesor ekonomi dari Universitas Colombia Amerika Serikat menilai ekonomi global dan pasar bebas tidak lain dari pada bungkus baru dari developmentalisme yang merupakan episode lanjutan dari imperialisme ekonomi yang gagal memajukan kesejahteraan masyarakat dunia.

2. Reaksi Terhadap Globalisasi Ekonomi

Para pendukung globalisasi ekonomi dan pasar bebas bersikap sangat proaktif terhadap globalisasi ekonomi. Bagi mereka, keterkaitan dan kebergantungan ekonomi antara bangsa manusia di seluruh dunia melalui perdagangan bebas, investasi dan bentuk-bentuk interaksi ekonomi dan komersial lainnya mengakibatkan produksi barang tertentu bisa dibuat dan dinikmati bersama oleh banyak orang dari berbagai negara dan masyarakat. Hilir mudiknya kapal-kapal dagang yang mengangkut dan menjual-belikan barang dan jasa tertentu menunjukkan adanya keterkaitan dan kebergantungan ekonomi antar manusia. Transformasi ekonomi global telah membawa hampir semua bangsa dan lapisan masyarakat kepada globalisme ekonomi, dan sekaligus menumbuhkan kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia memiliki satu sistim ekonomi (Yusanto, 2008; Prasetyantoko, 2001).

Kebergantungan antara manusia dalam kehidupan sosial ekonomi telah difasilitasi oleh kemajuan teknologi komunikasi global seperti telepon genggam, televisi satelit dan internet yang membuat proses globalisasi ekonomi menjadi semakin cepat. Kemajuan teknologi global ini mengakibatkan perjalanan serta pergerakan manusia untuk kegiatan

ekonomi dan bisnis semakin mudah. Jaringan komunikasi global membantu memperluas pasar untuk barang yang sama ke berbagai belahan dunia. Sebagai contoh: KFC, celana jeans levi's, McDonal dan hamburger melanda pasar dimana-mana. Ember, piring, gelas, senduk dan lain-lain yang diproduksi di Jawa semakin mudah membanjiri setiap hari keluarga-keluarga di berbagai pelosok Indonesia. Akibatnya masyarakat dunia baik yang berdomisili di kota maupun di desa memiliki selera global yang sama dan dapat mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang sama pula. Saat ini terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam bidang investasi dan perdagangan internasional. Akibatnya, perekonomian nasional menjadi bagian dari perekonomian global yang difasilitasi oleh kekuatan pasar global (Yusanto, 2008; Prasetyantoko, 2001).

Perdagangan bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai belahan bumi bisa mengimpor dengan lebih banyak barang-barang dari luar negeri. Dengan demikian, konsumen mempunyai pilihan lebih banyak atas berbagai macam produk sehingga dapat menikmati lebih banyak barang yang bermutu dengan harga terjangkau. Meluasnya perdagangan bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas. Selanjutnya modal untuk pembangunan sektor industri dan sektor lainnya dalam negeri yang dilakukan perusahaan-perusahaan domestik dapat diperoleh dari investasi asing. Perusahaan-perusahaan domestik ini sering memerlukan modal dari bank atau saham luar negeri yang memasuki pasar uang dan pasar modal dalam negeri. Sadar akan kenyataan ini, Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin sebagaimana dikutip oleh Haris dan Dudy (2002) mengatakan bahwa globalisasi yang disemangati oleh neoliberalisme merupakan pencipta kesejahteraan paling berhasil yang pernah dikenal dunia. Namun pertanyaannya ialah apakah hasil produksi dan sumber kemakmuran global itu sudah didistribusikan secara adil?

Ekonomi global diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dunia sebab masyarakat dunia saling bergantung dan bisa mendatangkan keuntungan bagi satu sama lain. Salah satu bentuk kebergantungan paling signifikan ialah negara-negara dapat melakukan transaksi bisnis dan pertukaran nilai dagang sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Sebagai contoh, negara Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam hal produk kamera digital sementara itu Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam hal produk lainnya. Dengan demikian, Jepang dianjurkan menghentikan produksi lainnya yang

dibuat di Indonesia dan mengalihkan faktor-faktor produksi untuk memaksimalkan produksi kamera digital (Yusanto, 2008; Republika, 2006).

Salah satu penghambat utama ekonomi global dan kerjasama ekonomi antara negara terletak pada larangan dan kebijakan proteksi dari pemerintah atau negara pengimpor. Kebijakan seperti ini dinilai dapat meningkatkan biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar dunia. Sadar akan hambatan ini, pendukung ekonomi global menolak berbagai tarif, proteksi dan larangan akan barang-barang impor. Sebaliknya menghendaki agar diberlakukan kebijakan perdagangan bebas sehingga harga barang impor dapat ditekan, permintaan masyarakat akan barang impor meningkat, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat dan fair. Meningkatnya barang impor ini dapat mensejahterakan masyarakat. Bertitik tolak dari keyakinan ini, para pendukung ekonomi global terus berupaya menurunkan sekaligus menyeragamkan tarif serta menghapus berbagai hambatan non-tarif barang impor (Yusanto, 2008; Republika, 2006).

Berbeda dengan pandangan para pendukung ekonomi global, kelompok antiglobalisasi ekonomi menentang perjanjian perdagangan global dan lembaga-lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO); World Bank dan IMF yang mendukung gerakan pasar bebas. Gerakan antiglobalisasi ini terdiri dari masyarakat dan negara yang merasa dirugikan oleh ekonomi global karena dianggap mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional dan dunia ketiga. Hasil analisis para penentang ekonomi global menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi dan pasar bebas telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan multinasional memonopoli berbagai sektor bisnis bahkan pangan sekalipun yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini tentu saja menjadi sumber kemiskinan, kelaparan, depresi dan kriminalitas. Metro TV sering memberitakan bagaimana keluarga-keluarga miskin mati kelaparan, para ibu membunuh diri dan anaknya sendiri karena kesulitan ekonomi rumah tangga. Kebijakan globalisasi ekonomi sebagaimana dijalankan Bank Dunia, IMF dan WTO sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberi jalan keluar atas kemiskinan untuk keluarga dan masyarakat kecil (Winarno, 2004; Prasetyantoko, 2001).

Globalisasi ekonomi juga telah memperburuk neraca pembayaran barang-barang impor karena harga barang-barang impor cenderung

meningkat. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Investasi asing yang terus bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan investasi ke luar negeri terus meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran dan dengan demikian sektor keuangan semakin tidak stabil. Investasi asing yang terus bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan investasi ke luar negeri semakin besar. Menurunnya nilai ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran dan dengan demikian sektor keuangan semakin tidak stabil. Dampak buruk dari globalisasi dalam bidang ekonomi ini pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, lapangan kerja bertambah kurang dan masalah pengangguran semakin sulit teratasi (Haris & Dudy, 2002).

Globalisasi merupakan sumber kemiskinan. Krisis ekonomi global di Asia dan Amerika Latin telah mengancam perekonomian dan stabilitas negara-negara berkembang. Krisis tahun 1997 dan 1998 bahkan merupakan sebuah ancaman bagi seluruh perekonomian dunia. Stiglitz (2002) sebagaimana yang dikutip oleh Yusanto (2008) mengatakan ekonomi global dan pasar bebas telah menghasilkan kemiskinan yang luar biasa. Di dalam bukunya: *In the Shadow of Globalization, Stiglitz secara terang-terangan mengatakan bahwa pemenang (the winner) dari globalisasi ekonomi dan pasar bebas adalah negara-negara industri/maju dan international corporations. Sementara itu, sebagian besar negara berkembang menjadi pecundang atau the loser dari politik globalisasi ekonomi dan pasar bebas.*

3. Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Ekonomi Makro dan Mikro

Dalam era ekonomi global ini, perusahaan-perusahaan multinasional memonopoli seluruh perekonomian dunia. Sebagai contoh, saat ini terdapat 5 buah perusahaan besar milik Amerika Serikat yang selalu meraup keuntungan besar sampai US\$ 123 milyar (Rp 1.131,6 trilyun) per tahun (1US\$=Rp 9.200). Exxon Mobil misalnya mengantongi keuntungan US\$ 40 milyar setiap tahun, pada hal investasinya hanya sekitar US\$ 100 juta. Melalui monopoli kartel minyak yang menguasai hampir semua sumber minyak di dunia, termasuk Indonesia, kartel minyak dapat menaikkan harga minyak dunia dari US\$ 24/barrel menjadi lebih dari US\$ 110/barrel. Pada

hal biaya pengolahan minyak tidak lebih dari US\$ 15/barrel (Yusanto, 2008).

Robert H. Strahm sebagaimana dikutip Yusanto (2008) mengatakan, saat ini kita hidup dalam sebuah dunia dimana 26 % penduduknya menguasai lebih dari 78 % produksi, 81 % energi, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia. Sebaliknya 74 % penduduk dunia pada negara-negara berkembang (Afrika, Asia, dan Amerika Latin) hanya mendapat seperlima produksi dan kekayaan dunia. Perusahaan-perusahaan multinasional atau bermodal besar memonopoli berbagai sektor bisnis hingga bidang pangan. Duncan McLaren dan Willmore seperti dikutip Nizami (2008) mencatat bahwa pada tahun 2003 terdapat lima ratus perusahaan multinasional mengontrol hampir dua per tiga perdagangan dunia. Bahkan lima perusahaan multinasional terbesar dunia secara bersama-sama menghasilkan nilai penjualan tahunan lebih besar dibanding pendapatan 46 negara termiskin di dunia. Berdasarkan kenyataan ini, para penantang globalisasi mengatakan bahwa globalisasi yang diagung-agungkan sebagai ratu kesejahteraan dunia pada akhirnya mulai menampakkan keborokannya sebagai sumber kemiskinan.

Castel sebagaimana dikutip Rais (2008) mengatakan bahwa bertentangan dengan keuntungan besar yang diraup perusahaan multinasional dan para kapitalis, negara-negara miskin malah bertambah miskin. Pada saat ini kurang lebih 33 % penduduk dari negara-negara berkembang hidup dalam kemiskinan. Dari jumlah itu, 550 juta jiwa berada di Asia Selatan, 215 juta di Sub-Sahara Afrika, dan 150 juta di Amerika Latin. Rais (2008) mengatakan, kesenjangan antara kaya dan miskin ini juga dapat dilihat dari data-data berikutnya. Demi memperbaiki pendidikan dasar pada negara-negara berkembang, dibutuhkan dana 6 miliar USD setahun. Jumlah uang ini lebih sedikit dibanding dana 8 miliar USD setahun untuk belanja kosmetik di AS saja. Demikian pula dana yang diperlukan untuk instalasi air dan sanitasi seluruh negara berkembang kurang lebih 9 miliar USD setahun. Jumlah dana ini lebih kecil dari dana konsumsi es krim di Eropa yang besarnya 11 miliar USD setahun. Negara-negara berkembang memerlukan dana sebesar 13 miliar USD untuk pemeliharaan kesehatan dan nutrisi setahun. Dana ini lebih kecil dibandingkan dengan dana untuk pakan hewan peliharaan (anjing dan kucing) di Eropa dan AS yang berjumlah 17 miliar USD setahun.

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas dalam praktek berarti keluarga, masyarakat dan negara-negara miskin dan berkembang harus membiayai efisiensi dunia demi kesejahteraan masyarakat dan negara industri atau kaya. Selatan membiayai efisiensi global demi keuntungan dan kemajuan Utara. Kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin ini telah melahirkan semakin banyak keluarga dan orang miskin di dunia ketiga. Pada tahun 1990, terdapat 2.718 miliar penduduk hidup dengan uang kurang dari \$ 2 per hari/orang. Jumlah ini meningkat menjadi 2.801 pada tahun 1998. Ironisnya, hal ini terjadi ketika terjadi peningkatan total pendapatan dunia secara aktual sebesar rata-rata 2,5% setiap tahun (Nizami, 2008; Prasetyantoko, 2001).

Dominasi atau penguasaan atas tatanan kehidupan sosial ekonomi oleh para pemilik modal besar melalui kebijakan ekonomi global dan pasar bebas juga sangat dirasakan di Indonesia. Hal ini terlihat dari melonjaknya harga minyak, beras dan harga kebutuhan pokok sehari-hari dari waktu ke waktu. Pada zaman Soeharto, pengusaha industri dilarang masuk ke sektor pertanian dan perkebunan sebab hal itu akan mematikan mata pencaharian petani. Soeharto selalu berusaha agar pangan tidak dikontrol segelintir pengusaha. Namun saat ini, para pengusaha termasuk pengusaha luar negeri bebas masuk ke sektor pertanian dan perkebunan serta menguasainya. Mereka cenderung memikirkan keuntungan sendiri dan bukannya kepentingan rakyat. Ketika harga pangan internasional naik, mereka juga dengan cepat menaikkan harga pangan. Karena tidak heran kalau harga minyak goreng meroket dari Rp 6.000/kg hingga menjadi Rp 14.000/kg hanya dalam hitungan bulan. Kalau rakyat tidak mau beli dengan harga tinggi maka para pengusaha tinggal mengeksport keluar negeri. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan pangan (Nizami, 2008; Prasetyantoko, 2001).

Era globalisasi ekonomi dan pasar bebas juga memperkuat pasar uang, modal dan pasar komoditi. Saat ini uang hanya menjadi bahan spekulasi untuk mendapat untung oleh para spekulan valas (valuta asing). Banyak negara seperti Inggris, Thailand, Singapura, Malaysia, Korsel dan Indonesia hancur perekonomiannya karena mata uangnya jatuh akibat permainan spekulan valas. Pasar uang telah mengakibatkan modal yang seharusnya bisa dipergunakan untuk mendirikan banyak perusahaan terus berputar-putar di kalangan spekulan saham untuk mendapat untung. Tercatat sekitar Rp 1.000 trilyun transaksi saham terjadi di Bursa Saham

Indonesia setiap hari, namun lebih dari 90 % hanya dipakai untuk spekulasi antara pemain saham. Uang mengalir ke sektor ril atau ekonomi untuk usaha ekonomi produktif sejauh ada isu riil atau benar. Persoalan ini membuat perusahaan menjadi bangkrut seperti perusahaan Enron di AS (Nizami, 2008; Prasetyantoko, 2001).

Sampai dengan saat ini, terdapat begitu banyak pertambangan dalam negeri seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga dan lain-lain di kelolah perusahaan asing. Perusahaan ini telah mengeruk keuntungan besar dan hanya menyisakan sedikit receh untuk kolaborator yang bekerja untuk kepentingan mereka. Pada hal pertambangan itu seharusnya dikelola bersama rakyat Indonesia melalui BUMN supaya hasilnya bisa dinikmati juga oleh rakyat. Privatisasi yang menjadi salah satu kunci globalisasi ekonomi dan pasar bebas memaksa pemerintah menyerahkan BUMN-BUMN yang merupakan sumber dan kekuatan ekonomi rakyat kepada pihak swasta. Celaknya swasta tidak mau menerima BUMN yang rugi dan sebaliknya hanya mau menerima yang menguntungkan dan menghasilkan banyak uang. Akhirnya puluhan trilyun rupiah hasil keuntungan BUMN yang sebetulnya harus masuk ke Anggaran Belanja Negara (APBN) malah sekarang lari ke kantong segelintir pemilik uang. Sektor perkebunan kelapa sawit 100 % dikuasai swasta. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak punya kekuatan untuk mengontrol harga minyak goreng yang susah terjangkau oleh masyarakat sebab selalu mengikuti harga internasional. Seharusnya pemerintah paling sedikit menguasai lebih dari 50 % perkebunan ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga yang terjangkau. Swasta hanya memikirkan keuntungan/bisnis dan karena itu tidak bisa diharapkan berjiwa sosial atau memenuhi kebutuhan rakyat (Nizami, 2008; Prasetyantoko, 2001).

4. Globalisasi dan Kemiskinan

Kebergantungan kepada negara-negara maju atau industri yang menguasai perusahaan multinasional semakin besar menyebabkan harga berbagai produk didominasi dan nilai uang dikendalikan oleh industri besar dan pemilik modal. Masyarakat kecil seperti petani dan nelayan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menentukan harga dari produk sendiri. Pada titik ini, globalisasi ekonomi dan pasar bebas merupakan sumber kekayaan bagi pemilik modal dan industri besar, dan sebaliknya menjadi sumber pemiskinan dan penderitaan bagi keluarga dan masyarakat kecil.

Kemiskinan pada dasarnya diartikan sebagai tidak tersedianya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, pakaian dan rumah yang layak huni bagi seseorang atau sebuah keluarga. Seorang dikatakan miskin kalau mengalami kekurangan gizi, tidak mampu membeli obat ketika sakit, pendapatan kurang, pendidikan rendah serta kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pemerintah mengklaim bahwa penduduk miskin mencapai 31,6 juta orang atau 13,3 % dari jumlah penduduk Indonesia. Kemiskinan terdiri dari beberapa bentuk yaitu kemiskinan absolut, relatif, kronis, dan struktural. Kemiskinan absolut yakni kondisi kehidupan dimana pendapatan seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan sementara atau relatif yakni kondisi hidup dimana kebutuhan pokok seseorang tidak terpenuhi karena bencana alam, kekeringan dan lain-lain. Kajian tentang kemiskinan memperlihatkan sejumlah dimensi kemiskinan yaitu kemiskinan ekonomi/material serta kemiskinan sosial budaya. Dimensi kemiskinan material atau ekonomi nampak dari ketidakmampuan seseorang atau sebuah keluarga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidup sehari-hari seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain-lain karena harga barang kebutuhan pokok terus meningkat, sementara itu pendapatan keluarga dan masyarakat tidak meningkat. Budaya kemiskinan dapat terlihat dari terlembaganya sikap hidup apatis, apolitis, fanatik dan ketidakberdayaan (Bolong, 2007; Deizy A. Asis, 2005; Harian Kompas, 28 Januari 2011).

Kemiskinan disebabkan oleh melonjaknya harga minyak dan harga kebutuhan pokok sehari-hari dari waktu ke waktu, terutama harga beras. Hal ini disebabkan harga kebutuhan pokok ini dikendalikan oleh sektor swasta yang cenderung memikirkan keuntungan sendiri. Sementara itu, Badan Senior Ekonomi Bank Dunia Vivi Alatas (Harian Kompas, 28 Januari 2011) dan (Khudori, 2011) mengingatkan bahwa inflasi telah meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2011 ini. Inflasi ini sebagian besar dipicu oleh melonjaknya harga pangan terutama beras. Ia mengatakan, sulit diharapkan bahwa harga beras akan turun dalam beberapa bulan ke depan karena trend harga internasional komoditas beras naik. Harga beras pada bulan Desember 2010 naik 30 % dibandingkan dengan Desember 2009. Diperkirakan harga beras akan naik dua kali lipat tahun ini. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dingatkan untuk memperketat ekspansi beras.

Kemiskinan juga diakibatkan karena sumber-sumber kehidupan masyarakat seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga dan lain-lain dikuasai dan dikelola perusahaan asing. Sementara itu lahan untuk produksi bagi masyarakat kecil telah diambil alih oleh pemodal besar untuk perusahaan dan mall-mall besar. Saat ini terdapat 69,4 juta hektar tanah di Indonesia dimonopoli 652 pengusaha. Akibatnya banyak petani gurem yang memiliki tanah kurang dari 0,4 hektar atau tidak memiliki tanah sama sekali hingga terpaksa menjadi buruh tani dengan penghasilan kurang dari Rp 300 ribu per bulan. Dikuasainya aset-aset ekonomi oleh segelintir pemilik modal besar ini menyebabkan masyarakat kecil selalu mengalami kekuarangan makanan, pengangguran, serta memburuknya kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat kecil (Bolong, 2007; Deizy A. Asis, 2005).

Faktor lain dari kemiskinan ialah ketidakmerataan distribusi sumber kekayaan material, alam, modal dan teknologi. Contoh konkrit yang bisa diungkapkan disini adalah kasus Irian Jaya. Pulau ini memiliki kekayaan minyak dan emas luar biasa banyaknya. Namun kekayaan ini telah dieksploitasi dan dibawa ke luar secara besar-besaran oleh mereka yang memiliki modal besar dan memiliki akses kepada kekuasaan. Sementara itu, masyarakat lokal tetap hidup miskin. Demikian pula Riau dan Kalimantan Timur yang sangat kaya dengan sumber daya alam tetapi masih terdapat begitu banyak masyarakat yang buta aksara jikalau dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Jadi semakin kaya suatu daerah, tidak secara otomatis membawa berkah kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Bolong, 2007; Deizy A. Asis, 2005).

Dampak kemiskinan tidak hanya ditanggung hari ini melainkan akan terus terbawa jauh ke masa depan bila tidak ada upaya serius memutuskan rantai kemiskinan. Dampak kemiskinan ini secara khusus ditanggung oleh sekelompok masyarakat yang paling lemah terutama anak-anak, ibu keluarga dan para perempuan umumnya. Di Indonesia, pada tahun 2005, jumlah bayi yang lahir dengan kondisi berat badan rendah karena kurang gizi mencapai 350.000. Sedangkan bayi yang berada di bawah lima tahun menderita busung lapar sebanyak 1,67 juta. Jumlah balita busung lapar ini meningkat menjadi 2,3 juta pada tahun 2006; dan pada tahun yang sama jumlah kematian ibu saat melahirkan menjadi 307 per 100.000 kelahiran. Ini berarti dalam setiap satu jam terdapat dua ibu meninggal ketika sedang bersalin. Hasil riset kesehatan dasar 2010 mengungkapkan bahwa jumlah penderita gizi kurang/buruk di kalangan anak Balita mencapai 17 %.

Masalah kekurangan gizi disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kesulitan ekonomi, persoalan sosial budaya, kurangnya pengetahuan gizi, kesulitan akses pangan. Tetapi faktor utama yang mendasar adalah kemiskinan. Masalah kurang gizi di Indonesia kurang bisa diatasi karena program pengetasan keluarga dan masyarakat miskin juga belum menunjukkan hasil yang signifikan (Ali, 2011; Deizy A. Asis, 2005).

Sampai dengan saat ini, kemiskinan, penindasan, kebodohan, ketidakadilan, pelanggaran terhadap hak azasi manusia masih saja terus terjadi terutama terhadap masyarakat dan keluarga kecil atau miskin. Demikian pula, korupsi, kolusi dan nepotisme masih terus dilakukan secara perseorangan maupun kolektif. Semuanya ini tidak terlepas dari praktek kolusi manipulasi ekonomi global serta kebodohan politik nasional. Sekitar pertengahan April 2011, harian Kompas menurunkan sejumlah berita tentang betapa Indonesia dirugikan terkait perlakuan Perjanjian Pasar Bebas Asean-Cina (PDBAC). Himahanto (2011) menilai bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas kerap digunakan negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional mereka, dan untuk mengintervensi kedaulatan hukum serta negara lain setelah era kolonialisme berakhir. Perjanjian di bidang perdagangan sangat menguntungkan negara yang memiliki kebijakan mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi ke negara lain. Namun tidak sebaliknya bagi negara yang pelaku usahanya masih berkonsentrasi dalam negeri. Situasi seperti ini membuat seratusan juta warga masyarakat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan.

5. Respon Agama Terhadap Globalisasi Ekonomi

5.1. Agama-agama Dunia Menentang Globalisasi Ekonomi

Sadar akan pengaruh globalisasi ekonomi terhadap kemiskinan ini, maka agama-agama dunia (Islam, Katolik, Hindu, Budha) pada umumnya menentang kebijakan ekonomi global dan pasar bebas. Banyak agama menunjukkan sikap resistensi terhadap globalisasi ekonomi. Di Mesir, kekecewaan terhadap pembangunan telah melahirkan gerakan berbasis keagamaan yang disebut oleh Mansour Fakih sebagai gerakan "*fundamentalis Islam*". Di India, resistensi terhadap globalisasi ekonomi dan pasar bebas nampak pada kelompok Hindu Revivalis yang mendesak India untuk memboikot barang-barang buatan asing. Sikap resistensi agama terhadap globalisasi ekonomi dan pasar bebas juga diungkapkan oleh

Norena Heertz ketika melukiskan bagaimana terkikisnya identitas masyarakat Budha di kerajaan Bhutan yang terletak di antara Tibet dan India. Menurutnya, masyarakat Bhutan telah berubah gaya hidupnya dari sederhana menjadi konsumtif dan hedonis karena globalisasi. Sementara itu, resistensi Katolik terhadap globalisasi ekonomi terlihat dari sikap Paus Johannes Paulus II yang menginginkan kembalinya komunitas-komunitas lokal, mandiri, dan terjalin erat, bukan komunitas yang didominasi perusahaan multinasional, pasar modal, dan birokrat internasional seperti IMF dan WTO (Mansour, 2003; Haris & Dudy, 2002).

Agama Islam merupakan penentang paling kuat terhadap globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Sebab Islam melihat dirinya sendiri sebagai sebuah ideologi yang ingin menggantikan mazhab neoliberalisme yang merupakan ideologi dasar dan spirit dari globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Hizbut Tahrir bahkan mengusulkan suatu gerakan Islam Internasional untuk mengembangkan ideologi Islam untuk menggantikan ideologi kapitalisme dan neoliberalisme dengan Islam. Tahrir yakin bahwa Islam adalah kebaikan yang diturunkan Allah bukan hanya untuk umat Islam, namun juga untuk seluruh umat manusia. Karena itu, Ia ingin membebaskan setiap manusia dari cengkaman globalisasi ekonomi dan pasar bebas dengan menggunakan ajaran dan kepercayaan Islam sebagai dasar perjuangan pembebasan ini (Mansour, 2003; Haris & Dudy, 2002).

5.2. Keberpihakan Agama Kepada Kaum Miskin

Tidak cukup bagi institusi agama untuk menunjukkan sikap resistensi terhadap globalisasi. Mansour (2001) berpendapat bahwa banyak agama menunjukkan sikap resistensi terhadap globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Tetapi sikap resistensi saja tidak cukup mengingat hal penting, mendesak dan paling dibutuhkan masyarakat saat ini ialah pelaksanaan peran dan fungsi kenabian agama sebagai kritik dan agen pembaharuan sosial demi kepentingan keluarga dan masyarakat kecil.

Banyak teolog dan sosiolog telah memberi pemaknaan tentang peran dan fungsi kenabian agama di tengah masyarakat. Durkheim, misalnya berpendapat bahwa agama merupakan faktor esensial bagi identitas dan integritas masyarakat. Dengan kata lain, agama adalah suatu sistem simbol dimana masyarakat bisa menjadi sadar akan dirinya dan cara pikirnya sebagai suatu eksistensi kolektif. Sistem simbol ini terpusat pada martabat manusia sebagai pribadi, kesejahteraan umum dan norma etik (Bolong,

2007; Toha & Khairul, 2008). Sadar akan hakekat agama sebagai eksistensi kolektif ini maka, agama memiliki dalam dirinya sendiri kekuatan luar biasa untuk memobilisasi kekuatan kolektif untuk melawan ketidakadilan dimana sebagian besar kekayaan dunia hanya dikuasai dan dikonsumsi segelintir orang yang bermodal besar dan memiliki akses kepada kekuasaan. Perjuangan itu diarahkan kepada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umum.

Agama memiliki otoritas untuk menilai tatanan sosial saat sekarang serta mengarahkannya kepada gambaran masyarakat ideal yang perlu diperjuangkan melalui suatu gerakan bersama. Max Weber menegaskan bahwa agama memiliki otoritas tersendiri untuk mewujudkan suatu masyarakat ideal. Alasannya ialah nilai keagamaan yang dihayati para penganutnya akan membentuk watak dan perilaku, motivasi, semangat kerja keras dan nilai-nilai kemanusiaan yang dibutuhkan untuk perubahan dan pembaharuan demi suatu kehidupan yang lebih baik dan manusiawi. Singkatnya agama menjadi sumber strukturisasi masyarakat (Bolong, 2007; Toha & Khairul, 2008). Menghadapi situasi kemiskinan yang berakar pada ketidakadilan sosial dalam era global ini, agama yang memiliki otoritas sebagai agen transformasi sosial harus berani mengkritisi ketidakmerataan distribusi sumber daya modal, teknologi serta kekayaan mineral seperti minyak dan emas yang dieksploitasi dan dimonopoli segelintir orang demi kepentingan sendiri. Dasar dari kritik sosial ini terletak pada keyakinan bahwa Allah menciptakan dan memberikan kekayaan di dunia ini tidak hanya untuk segelintir orang melainkan untuk semua umat manusia.

Agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan penciptaan budaya. Hal ini terjadi ketika manusia menerapkan akal budinya dalam kehidupan sosial dengan tujuan membawa masyarakat kepada perubahan dan pembebasan hidup misalnya dari belenggu kemiskinan. Nilai-nilai keagamaan yang dihayati dan diamalkan dengan sungguh-sungguh akan membawa seseorang kepada pembebasan ini. Demi mencapai hal ini, dibutuhkan suatu misi kenabian yang mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk berjuang bersama membebaskan diri dari kemiskinan, kebodohan, sikap apatis dan apolitis yang saat ini berakar kuat dalam politik ekonomi global dan pasar bebas. Misi pembebasan ini sebetulnya merupakan amanat Allah kepada manusia sejak dahulu kala mulai dari zaman para nabi sampai dengan hari ini sebagaimana tertuang dalam

kitab Suci dan ajaran masing-masing agama (Bolong, 2007; Toha & Khairul, 2008).

Prinsip utama kepedulian terhadap keluarga, masyarakat kecil dan miskin yang perlu dipegang oleh setiap institusi agama ialah kejujuran, keterbukaan, dedikasi dan pengorbanan. Keluarga dan masyarakat miskin adalah orang yang harus dibantu dan bukannya untuk dieksploitasi atau ditindas. Bantuan tersebut perlu mengedepankan semangat toleransi, menghindari pertentangan, mempromosikan cinta, membangun persaudaraan, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial, menjunjung tinggi martabat manusia, menciptakan pikiran serta kesadaran baru yang terlihat dalam semangat kerja keras, ketekunan dan keuletan serta perilaku hidup hemat (Bolong, 2007; Toha & Khairul, 2008). Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana dan sejauhmana institusi agama katolik mengaplikasi misi profetik-keagamaan ini?

5.3. Gereja Katolik dan Keberpihakan Kepada Kaum Miskin

Keberpihakan Gereja Katolik terhadap masyarakat dan keluarga miskin mendapat sorotan sangat khusus. Pimpinan Gereja, khususnya para Paus telah mengeluarkan ensiklik mengenai Ajaran Sosial Gereja dengan tujuan membela keluarga dan masyarakat miskin dan tertindas. Ensiklik *Quadragesimo Anno* misalnya telah memperlihatkan kerinduan Gereja yang begitu kuat untuk melayani dan memperhatikan kaum miskin. Gereja menolak semua bentuk eksploitasi terhadap masyarakat dan keluarga kecil yang dilakukan siapa saja terutama pemilik modal besar dan mereka yang berkuasa. Paus Yohanes Paulus II dalam *Mater Et Magistra* menegaskan bahwa cinta terhadap kaum miskin merupakan cinta yang berdasarkan Injil dan tidak keluar dari motivasi dan inspirasi sosio-ekonomi ataupun politik. Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II menegaskan pentingnya keberpihakan Gereja kepada kaum miskin melalui keterlibatan aktif memperjuangkan atau mengusahakan kesejahteraan umum. Jikalau perjuangan ini tidak dilakukan maka pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi, politik, budaya dan lain-lain dapat menjadi sumber pemiskinan dan penindasan oleh segentir orang (Hardawiryana, 1999).

Ajaran dan seruan Gereja Katolik untuk membela kaum miskin dan tertindas merupakan suatu bentuk keberpihakan Gereja paling konkrit terhadap masyarakat dan keluarga miskin. Keberpihakan ini tidak hanya

ditunjukkan melalui kata-kata, seruan, perasaan kasihan dan memberi sedekah, tetapi juga dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kritis agar mereka sendiri mampu membebaskan diri dari kemiskinan hidup serta situasi sosial politik, ekonomi dan budaya yang membuat mereka miskin. Untuk hal ini, para pendidik dan pembina iman dituntut selain memiliki pengetahuan dan keterampilan memberi pendidikan dan pengajaran agama secara kreatif dan transformatif, tetapi juga membantu mengatasi persoalan kemiskinan secara konkrit seperti melalui program kredit mikro, koperasi dan Credit Union. Lebih dari itu, para pembina iman perlu memiliki kepekaan dan pengetahuan tentang struktur sosial dan ekonomi global saat ini dimana negara-negara maju dan perusahaan multinasional terus memonopoli seluruh bisnis dan sumber perekonomian dunia (Bolong, 2007; Toha & Khairul, 2008).

Kasih dan keberpihakan kepada masyarakat kecil dan miskin telah ditunjukkan Yesus sendiri ketika memberi makan lima ribu orang lapar dan haus yang mengikuti Dia (Injil Mat 14: 13-21; Mrk 6:30-44). Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan cinta kasih dengan kata-kata melainkan juga perbuatan konkrit dengan memberi makan kepada orang lapar. Yesus menghendaki agar Gereja dan para murid-Nya melakukan hal yang sama terhadap masyarakat kecil dan miskin. C.A (Centesimus Anus) No. 57 menegaskan bahwa amanat sosial Injil tidak dapat dipandang sebagai suatu teori melulu, melainkan sebagai dasar yang nyata dan motivasi untuk bertindak menolong orang miskin dan tertindas agar bisa keluar dari kemelut kemiskinan dan ketertindasan.

Bagi Gereja Katolik, bantuan dan keprihatinan kepada masyarakat kecil dan miskin perlu dilihat sebagai kesempatan untuk beramal kasih, memperkaya keadilan, mencegah berbagai konflik dan kerusuhan yang timbul di tengah umat. CA 58, mengatakan bahwa cinta kasih terhadap kaum miskin diwujudkan secara nyata dalam usaha memperjuangkan keadilan. Keadilan tidak akan tercapai seutuhnya, selama orang miskin yang meminta bantuan untuk mempertahankan hidupnya masih dianggap sebagai suatu beban, dan bukannya sebagai kesempatan beramal serta memperkaya keadilan. Misi keadilan dan pembebasan ini merupakan amanat Allah yang telah disampaikan sejak zaman para Nabi dan mencapai puncaknya dalam diri Yesus yang turun ke dunia, hidup dalam kesederhanaan, berjuang menegakkan keadilan bagi orang miskin hingga wafat di salib.

Penutup

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas merupakan sumber kekayaan bagi pemilik modal besar dan mereka yang memiliki akses kekuasaan, sebaliknya menjadi sumber pemiskinan dan mala petaka bagi kebanyakan keluarga dan masyarakat kecil. Para intelektual negara-negara berkembang sepakat bahwa globalisasi ekonomi merupakan mesin kapitalis yang memproduksi kemiskinan global karena telah merampas sebagian besar dari kekayaan dunia. Menghadapi kenyataan ini, perlu dilakukan reformasi hukum terutama yang terkait dengan hukum perdagangan bebas dan pembukaan akses pasar.

Peningkatan mutu kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta upaya mencari solusi atas masalah kemiskinan akibat kebijakan ekonomi global dan pasar bebas merupakan misi profetis dan tanggung jawab semua agama dan umat beriman. Alasannya ialah agama merupakan sesuatu yang bersifat sosial. Oleh karena itu masing-masing institusi agama perlu berusaha sekuat tenaga menginterpretasi dan mengaplikasikan misi profetik keagamaan secara kontekstual dan relevan. Agama Katolik sebagai suatu institusi agama di tengah masyarakat dunia mempunyai tugas dan tanggungjawab profetik untuk membela dan membebaskan keluarga dan masyarakat yang kurang beruntung dari kemiskinan dan ketertindasan melalui bantuan karitatif maupun pemberdayaan sosial ekonomi, politik, kesehatan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khomsan. Masalah Gizi Sebagai Beban Ganda. Kompas, 26 April 2011
- Asis Dezzy A., 2005. Bom Waktu Itu Bernama Kemiskinan. Dalam: OTONOMI. No.1. Tahun II/2005
- Asis Dezzy A., 2005. Harga Sebuah Kemiskinan. Dalam: OTONOMI. No. 1. Tahun II/2005.
- Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Cetakan I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2001
- Globalisasi dan Kemsikinan. Republika, Selasa, 7 November 2006.
- Haris Munandar & Dudy Priatna (pertej.) 2002. *Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad Ke-21*. Gilpin, Robert & Gilpin, Jean Millis. *The Challenge of Global Capitalisme*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Himahanto Juwani. 2011. Undang Undang Dasar dan Dagang Bebas. Harian Kompas. 29 April 2011.
- Khudori. 2011. Inflasi Pangan Dan Kemiskinan. Harian Kompas. Januari, 2011.
- Mansour Fakih. 2003. Bebas Dari Neoliberalisme. Insist Press, Yogyakarta.
- Prasetyantoko, A. 2001 *Arsitektur Baru Ekonomi Global: Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nizami. 2008. Kegagalan Globalisasi: Meningkatnya Kemiskinan, Kelaparan, Depresi dan Kriminalitas. <http://infoindonesia.wordpress.com>.
- Ola Rongan Wilhelmus. 2009. *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Sebagai Suatu Model Evangelisasi Dalam Konteks Indonesia*: Penerbit WINA PRESS 2010.

- Toha, Anis Malik dan Khairul Bayan. 2005. "Konsep World Theology dan Global Theology Eksposisi Doktrin Pluralisme Agama". *Jurnal Islamia*, Tahun I No 4, Januari - Maret 2005. Jakarta : Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)
- The International Forum on Globalization*, 2004. Does Globalization Helps the Poor?
- Winarno, Budi. 2004. *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru : Peran Negara dalam Pembangunan*. Tajidu Press. Yogyakarta.
- Widyamartaya & AB Widyanta. 2004. *The International Forum on Globalization: Does Globalization Help the Poor?*. Yogyakarta, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Rais, Mohammad Amien. 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!* PPSK Press. Yogyakarta.
- Vivin Alatas. 2011. Inflasi Memacau Kemiskinan. *Harian Kompas*. 28 Januari 2011.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2008. Globalisasi, Kemiskinan dan Agama. Makalah. Disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema: *Globalization: Challenge and Opportunity for Religions*. Universitas Gajah Mada, 2 Juli 2008.

PERSYARATAN PENULISAN ILMIAH DI JURNAL JPAK WIDYA YUWANA MADIUN

01. Jurnal Ilmiah JPAK Widya Yuwana memuat hasil-hasil Penelitian, Hasil Refleksi, atau Hasil Kajian Kritis tentang Pendidikan Agama Katolik yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di Majalah/Jurnal Ilmiah lainnya.
02. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris sepanjang 7500-10.000 kata dilengkapi dengan Abstrak sepanjang 50-70 kata dan 3-5 kata kunci.
03. Artikel Hasil Refleksi atau Kajian Kritis memuat: Judul Tulisan, Nama Penulis, Instansi tempat bernaung Penulis, Abstrak (Indonesia/Inggris), Kata-kata Kunci, Pendahuluan (tanpa anak judul), Isi (subjudul-subjudul sesuai kebutuhan), Penutup (kesimpulan dan saran), Daftar Pustaka.
04. Artikel Hasil Penelitian memuat: Judul Penelitian, Nama Penulis, Instansi tempat bernaung Penulis, Abstrak (Indonesia/Inggris), Kata-kata Kunci, Latar Belakang Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup (kesimpulan dan saran), Daftar Pustaka
05. Catatan-catatan berupa referensi disajikan dalam model catatan lambung.
Contoh: Menurut Caputo, makna religius kehidupan harus berpangkal pada pergulatan diri yang terus menerus dengan ketidakpastian yang radikal yang disuguhkan oleh masa depan absolut (Caputo, 2001: 15)
06. Kutipan lebih dari empat baris diketik dengan spasi tunggal dan diberi baris baru.
Contoh: Religions claim that they know man an the world as these really are, yet they they differ in their views of reality. Question therefore arises as to how the claims to truth by various religions are related. Are they complementary? Do they contradict or overlap one another? What –according to the religious traditions themselves—is the nature of religious knowledge? (Vroom, 1989: 13)
07. Kutipan kurang dari empat baris ditulis sebagai sambungan kalimat dan dimasukkan dalam teks dengan memakai tanda petik.
Contoh: Dalam kedalaman mistiknya, Agustinus pernah mengatakan "saya tidak tahu apakah yang saya percayai itu adalah Tuhan atau bukan." (Agustinus, 1997: 195)
08. Daftar Pustaka diurutkan secara alfabetis dan hanya memuat literature yang dirujuk dalam artikel. Contoh;
Tylor, E. B., 1903. Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Ert, and Custom, John Murray: London
Aswinarno, Hardi, 2008. "Theology of Liberation As a Constitute of Consciousness," dalam Jurnal RELIGIO No. 1, April 2008, hal. 25-35.
Borgelt, C., 2003. Finding Association Rules with the Apriori Algorithm, <http://www.fuzzi.cs.uni-magdeburg.de/~borgelt/apriori/>. Juni 20, 2007
Derivaties Research Unicorporated. <http://fbox.vt.edu.10021/business/finance/dmc/RU/content.html>. Accessed May 13, 2003